



Mulai Mei, Sarang Burung Walet dan Air Tanah Kena Pajak

YOGYAKARTA – DPRD Kota Yogyakarta akhirnya mengesahkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah. Dengan begitu, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) mulai Mei nanti akan menarik dua jenis pajak yang selama ini terhambat karena belum disahkannya Raperda Pajak Daerah.

"Setelah disahkan menjadi perda, kami sudah bisa menarik retribusi untuk pajak air tanah dan sarang burung walet. Selama ini kedua jenis pajak ini belum bisa kami realisasikan karena memang belum ada dasarnya," kata Kepala DPDPK Kota Yogyakarta Arbhak Yhoga Widodo di Kantor DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan tata pelaksanaan Perda Pajak Daerah telah

selesai dirumuskan dan tinggal menunggu pengesahan oleh Wali Kota Yogyakarta. "Kami yakin Mei nanti penarikan pajak kedua jenis pajak ini sudah bisa dilaksanakan karena telah memiliki dasar hukum yang pasti," tandas Arbhak.

Mengenai wajib pajak sarang burung walet, pihaknya belum memiliki data pasti berapa jumlah potensi wajib pajak. Namun, melalui petugas kewilayahan yang melakukan pengawasan di lapangan, pihaknya telah mendata potensi yang sudah ada saat ini.

"Potensi wajib pajak untuk pajak sarang burung walet data pasti memang belum ada. Namun, di mana ada kegiatan sarang burung walet, tentu akan menjadi wajib pajak jenis ini," ungkapnya.

Sementara itu, DPRD Kota

Yogyakarta juga mengesahkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Yogyakarta 2011. Prolegda tersebut berisi sepuluh Raperda. Meski molor satu triwulan, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Agung Atmodjo meyakini raperda yang harusnya dibahas di triwulan pertama dapat segera dituntaskan.

"Kita memang perlu kerja keras, tapi draf raperda yang triwulan pertama semua sudah siap di eksekutif sehingga pembahasan bisa dikebut bersama pembahasan raperda di triwulan kedua," tandasnya.

Keterlambatan pengesahan Prolegda dikarenakan tarik ulur pengkajian dua perda inisiatif dari Fraksi PDIP, yaitu Perda Kesetaraan Gender dan Perda Parkir.

● ratih keswara

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005